

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Nilai Produksi Rotan

TAHUN

2018

KONSEP

? Nilai Produksi Rotan adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi rotan yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tersebut.

- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
- Rotan adalah sekelompok palma dari puak (tribus) Calameae yang memiliki habitus memanjat, terutama Calamus, Daemonorops, dan Oncocalamus

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

RUMUS

Nilai Produk Rotan = Banyaknya Produksi x Harga Per Unit Produksi

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui Nilai Rupiah dari produksi Rotan di suatu wilayah hutan non kayu tertentu

INTERPRETASI

Nilai Produksi Rotan menunjukkan banyaknya nilai produksi yang dihasilkan dalam satuan Rupiah oleh hutan non kayu berupa rotan.

KETERANGAN

Daftar Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Menjadi Urusan Departemen Kehutanan Dalam Kelompok Hasil Tumbuhan dan Tanaman : Agathis/Damar, Bambu, awi jariyang, bambu kapal, bambu sisik, bambu mipis, bulok numpo. Damar, Embalau, Gaharu, Kapur barus, Kemenyan, Kesambi, Rotan jernang, Tusam

SUMBER

Survey Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HBK)

METODOLOGI

Pengamatan (observasi) Sebagian populasi (Survei) dengan menggunakan Sampel Probabilitas di Areal yang memiliki potensi HHBK berdasarkan hasil identifikasi dan masukan dari kabupaten/kota.

KEDALAMAN DATA

Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pusat Statistik

DOKUMEN

SIPD

